BPJS Ketenagakerjaan

Tantangan dan Peluang

Perlindungan Jaminan Sosial

Krishna Syarif
Direktur Pelayanan

Skema Perlindungan Saat Ini di BPJSTK



Perlindungan Saat ini sudah cukup komprehensif namun

masih terbatas untuk tenaga kerja yang aktif bekerja

BPJS Ketenagakerjaan

Kondisi Saat Ini

- Jaminan Pensiun belum dapat dinikmati oleh TK BPU
- Kepesertaan masih terbatas (15 juta)
- Replacement Ratio rendah

JP

- Dana JHT dapat diambil setiap saat
- Rate iuran sangat rendah
- Nilai manfaat rendah
- Belum jadi program wajib untuk pekerja BPU

JHT

- Manfaat sudah sangat komprehensif
- Kasus penanganan Penyakit Akibat Kerja sangat rendah

JKK

- Hanya dapat dinikmati oleh TK yang masih aktif bekerja (57 tahun)
- Manfaat masih berupa santuan uang

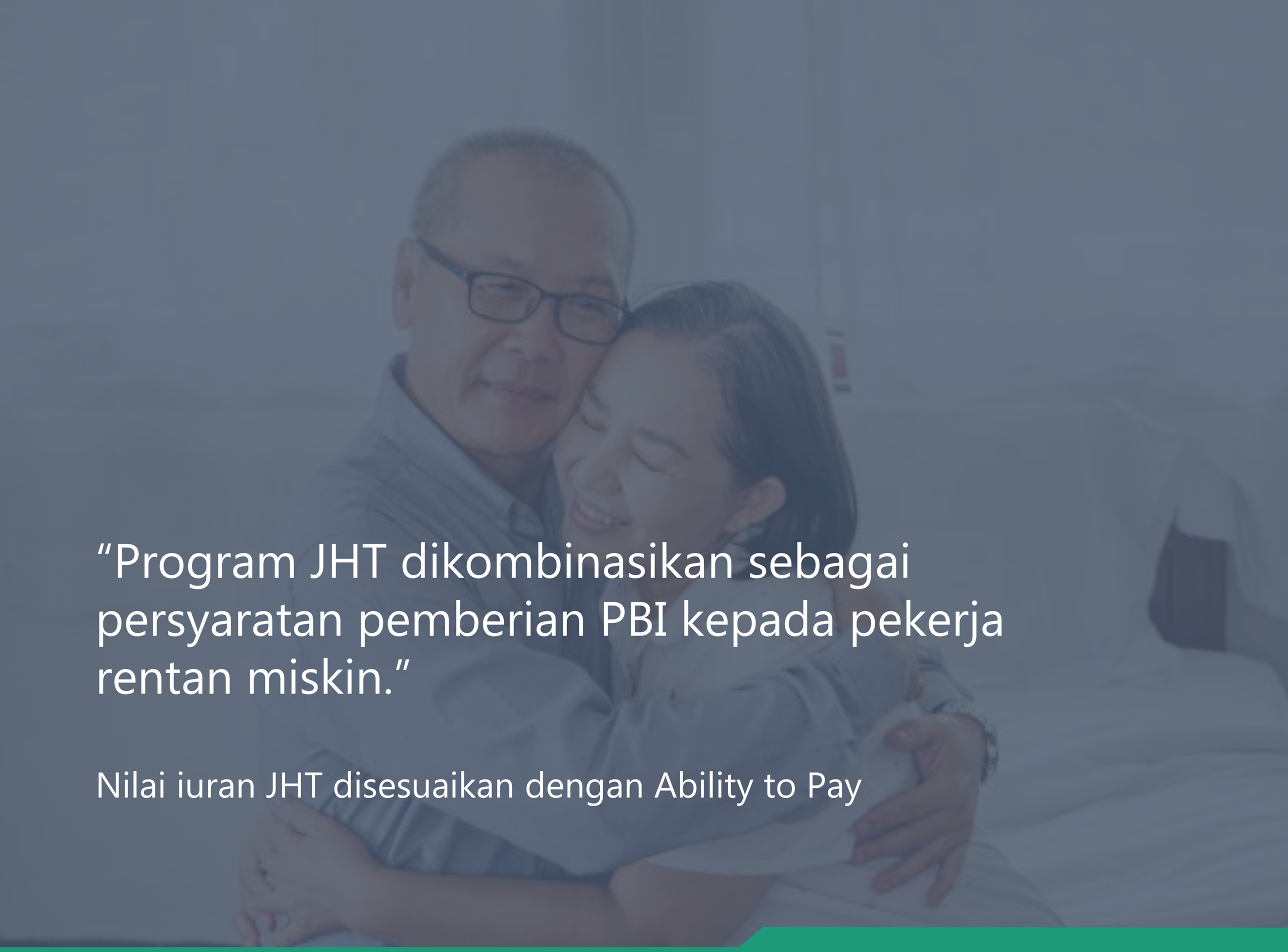
JKM

Hanya untuk Pekerja, baik Pekerja Penerima Upah maupun Bukan Penerima Upah

BPJS Ketenagakerjaan

Perluasan Perlindungan Sepanjang Hayat

	0 – 17 tahun	15 – 57 tahun	> 57 tahun
	Non Produktif	Pra Kerja dan Kerja	Paska Kerja
JKK	Kecelakaan dilindungi JKN	Perlindungan sudah Komprehensif	Kecelakaan dilindungi oleh JKN
JHT	Tidak ada perlindungan	• JHT sebagai program wajib untuk semua • Implementasi *Matching Contribution* sebagai insentif	
JKM	Usulan Tambahan: • Santunan pemakaman (mis: 2juta)	Pekerja menerima manfaat penuh Usulan Tambahan: • Anggota Keluarga dapat santunan pemakaman (mis: 2 juta)	Usulan Tambahan: • Pekerja: manfaat penuh (minimal masa iur 5 tahun) • Anggota keluarga dapat santunan pemakaman (mis: 2juta)
JP	Tidak ada Perlindungan	Masa kepesertaan dan membayar iuran	JP Berkala Usulan Tambahan: • JP untuk BPU (wajib ikut JHT) • Subsidi APBN untuk Pensiun Sosial kepada Lansia



“Program JHT dikombinasikan sebagai persyaratan pemberian PBI kepada pekerja rentan miskin.”

Nilai iuran JHT disesuaikan dengan Ability to Pay

Alternatif Pembiayaan Perluasan Kepesertaan

Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan saat ini baru bersumber pada kontribusi iuran jaminan sosial dari Pemberi Kerja dan Tenaga Kerja

PBI untuk BPJSTK

Alokasi prioritas subsidi anggaran untuk kebijakan Penerima Bantuan Iuran program JKK dan JKM untuk tenaga kerja, termasuk anggaran yang ada di Daerah

Restrukturisasi Anggaran Daerah

Opsi 1:

Anggaran bantuan sosial di daerah disentralisasi ke BPJSTK

Opsi 2:

Pemerintah mewajibkan program bantuan sosial sebagai salah satu program strategis nasional

Hybrid Dana Kelolaan BPJSTK dan APBN

Optimalisasi kelolaan investasi untuk dana JKK dan JKM yang diikombinasikan dengan subsidi APBN

BPJS Ketenagakerjaan

It s time to consider for a life-long protection for all